

POLICY BRIEF

WAJAH BARU UMKM KABUPATEN BADUNG : DIGITALISASI MERUBAH POLA PEMASARAN PRODUK UMKM

PENULIS:

Dr. Made Agus Sugianto & I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE

DITUJUKAN KEPADA:

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan dampak digitalisasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis untuk meningkatkan tingkat adopsi teknologi digital. Data menunjukkan bahwa UMKM yang telah menerapkan digitalisasi di Kabupaten Badung mengalami dampak positif yang signifikan, terutama dalam bentuk peningkatan omzet (70%) dan perluasan pasar (62%). Sebagai pilar utama perekonomian yang menyumbang mayoritas PDB nasional dan lapangan kerja, transformasi digital UMKM menjadi krusial untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Permasalahan rendahnya adopsi digital oleh UMKM di Kabupaten Badung karena kurangnya program pelatihan yang memadai. Hal ini diperparah oleh beberapa faktor pendukung, yaitu: literasi digital yang rendah di kalangan pelaku usaha, pengelolaan usaha yang masih kurang, dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur pendukung. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi UMKM. Tanpa intervensi, kesenjangan digital akan semakin melebar dan menghambat potensi pertumbuhan. Terdapat tiga alternatif solusi utama, yaitu: Alternatif 1: Pelatihan Gratis Kolaboratif, Alternatif 2: Portal Online (LMS) dan Alternatif 3: Pendanaan Berkelanjutan via CSR.

PENDAHULUAN

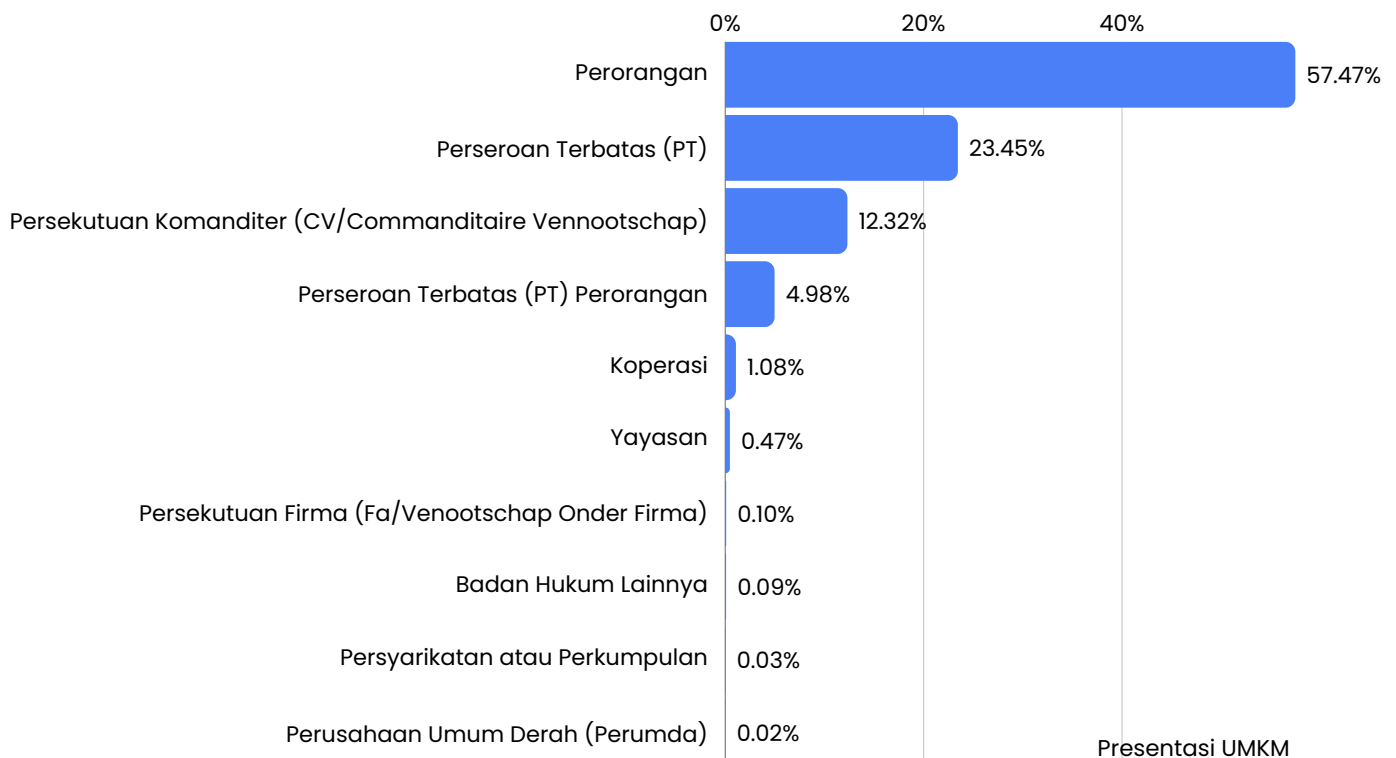
Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar penting perekonomian Bali dan Indonesia pada umumnya. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha [1]. Pengkategorian UMKM bisa dilaksanakan dengan melihat omzet usaha per tahun, besaran aset, atau jumlah karyawan yang dipekerjakan. UMKM banyak ditemukan di setiap daerah dengan beragam jenis sektor bisnis, termasuk di Kabupaten Badung. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM Indonesia mencapai 64 juta usaha atau 99% dari keseluruhan kegiatan usaha yang ada di Indonesia [2].

Selanjutnya, Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Badung, jumlah UMKM di Kabupaten Badung sebanyak 25.174 UMKM. Sampai dengan saat ini, belum teridentifikasi secara jelas UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital atau yang sudah menerapkan go digital. Digitalisasi UMKM adalah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Digitalisasi UMKM bukan hanya sekadar menggunakan teknologi untuk kegiatan penjualan produk [3]. Lebih dari itu, digitalisasi UMKM memungkinkan UMKM untuk mengatur keuangan, memantau cash flow bisnis, hingga memperoleh bahan baku secara online. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa digitalisasi berperan penting bagi berjalannya proses bisnis UMKM secara keseluruhan [4].

Mengacu pada hal tersebut, dirasakan perlu memaksimalkan peran para pelaku usaha UMKM dalam mengakses fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemerintah [5]. Hal [L1] ini nantinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Badung. Pengembangan digitalisasi UMKM tentunya memiliki banyak tantangan baik dari sisi permodalan usaha sampai dengan kapasitas SDM dalam hal teknologi digital [6]. Oleh karena itu, peran aktif Pemerintah Kabupaten Badung sangatlah penting untuk dapat mengidentifikasi potensi UMKM di daerah dan membuka jalan bagi para UMKM [L1] Bisa ditambahkan data-data (data d deskripsi)

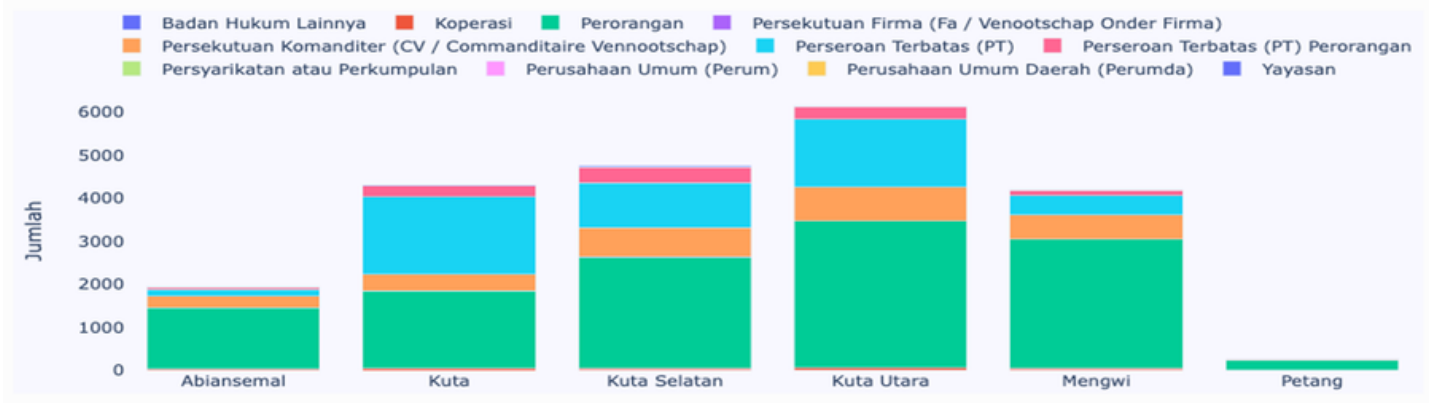
DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Badung, jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 21.699 usaha, dengan perincian usaha – usaha seperti pada gambar 1.

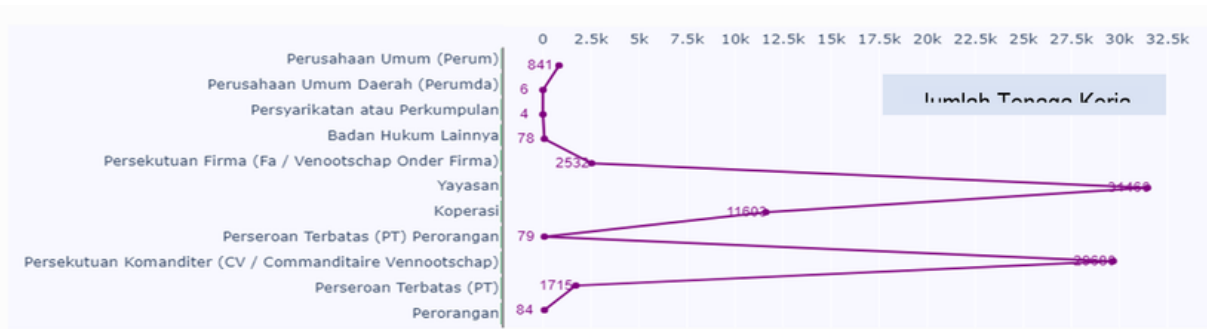


Gambar 1. Persentase UMKM Per Jenis Usaha

Kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak ada di Kuta Utara, diikuti oleh Kuta Selatan, Kuta, Mengwi, Abiansemal, dan terakhir adalah Petang (Gambar 2), yang mana jumlah tenaga kerja terbanyak dicakup oleh perusahaan dengan jenis usaha Yayasan (Gambar 3).

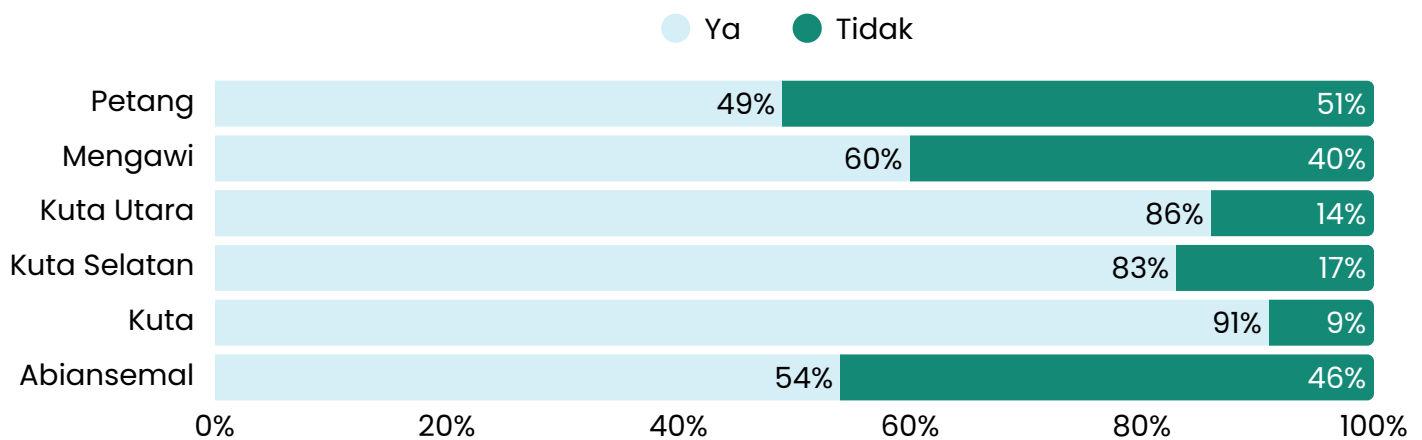


Gambar 2. Jumlah UMKM Per Jenis Usaha Per Kecamatan



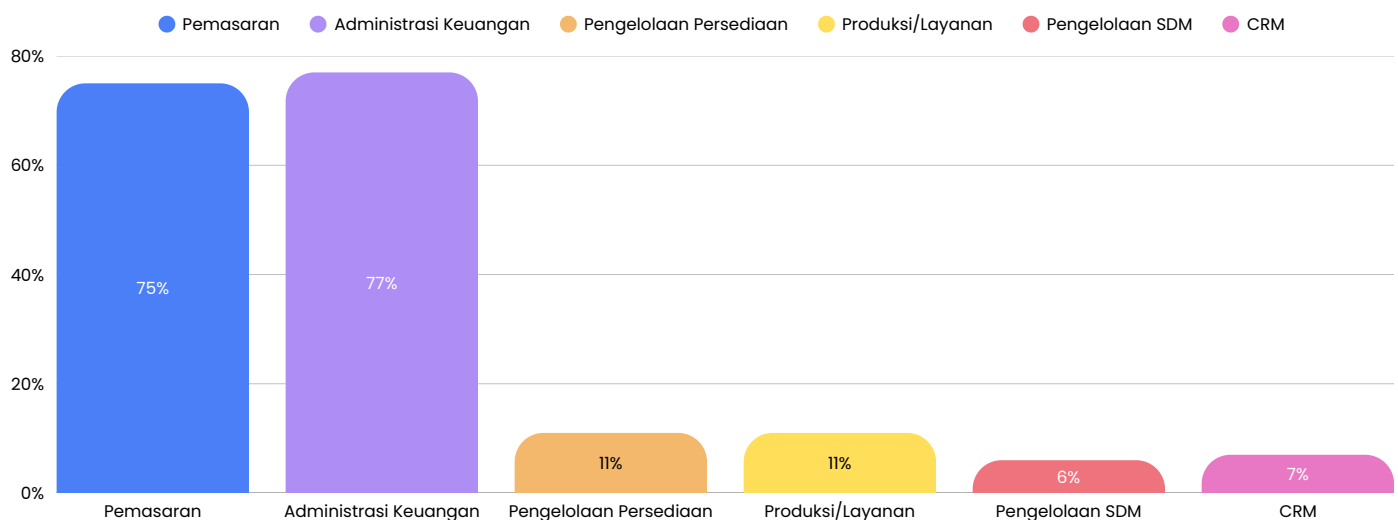
Gambar 3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM Per Jenis Usaha

Data jenis kelamin, jumlah pemilik UMKM laki-laki sebanyak lebih dari 12.500 orang dan pemilik UMKM perempuan sebanyak lebih dari 8000 orang. Upaya khusus perlu dilakukan untuk menyeimbangkan gender dari segi kepemilikan UMKM. Dari sebanyak 210 usaha yang didata, 70% menyatakan bahwa usaha tersebut sudah menerapkan digitalisasi, sedangkan 30% masih belum menerapkan digitalisasi. Kecamatan Kuta menerapkan digitalisasi tertinggi (91%) dan Kecamatan Petang yang terendah (49%) (gambar 4.)



Gambar 4. Persentase Penerapan Digitalisasi Per Kecamatan di Kabupaten Badung

Bidang penerapan digitalisasi tertinggi adalah bidang administrasi keuangan sebesar 77%, sedangkan di bidang pengelolaan SDM dan CRM masih di bawah 10% (Gambar 5.)



Gambar 4. Persentase Penerapan Digitalisasi Per Kecamatan di Kabupaten Badung

Aplikasi yang digunakan untuk kegiatan pemasaran dengan persentase tertinggi adalah Instagram yaitu sebanyak 48%. 36% UMKM juga menyatakan bahwa mereka menggunakan website dalam melakukan pemasaran. 13% dari responden menyatakan menggunakan Facebook, sedangkan 6% responden menyatakan menggunakan aplikasi lainnya untuk pemasaran termasuk WhatsApp, Ojek online, TikTok, Tokopedia, dan Shopee. Adapun problem tree permasalahan digitalisasi UMKM di Kabupaten Badung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. Problem tree permasalahan digitalisasi UMKM di Kabupaten Badung

Dari gambar 6. Akar permasalahan digitalisasi UMKM di Kabupaten Badung adalah Tingkat Pendidikan, Kurangnya Program Pelatihan, Terbatasnya Akses dan Infrastruktur dan Keterbatasan waktu serta SDM.

ALTERNATIF SOLUSI

Alternatif 1: Pemerataan Infrastruktur.

Memperkuat akses internet dan infrastruktur pendukung, terutama di wilayah dengan tingkat digitalisasi rendah seperti Kecamatan Petang.

Alternatif 2: Membuat portalonline (learning management system/LMS)

Portalonline (learning management system/LMS) berisi materi pelatihan digital yang bisa diakses gratis oleh semua UMKM. Penelitian Abdul Aziz, dkk (2024), LMS terbukti memberikan kontribusi positif dalam mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan kemudahan akses konsultasi.

Alternatif 3: Memberikan Insentif Khusus

Menyediakan paket data bertarif terjangkau untuk pelaku usaha serta memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal bagi UMKM yang berhasil mengadopsi teknologi secara menyeluruh.

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran data dan pemetaan digital UMKM secara akurat dan berkelanjutan
- Pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal bagi UMKM yang telah berhasil mengadopsi digitalisasi secara menyeluruh
- Penguatan Infrastruktur Digital di Kecamatan dengan tingkat digitalisasi rendah seperti Petang
- Pemerintah menyediakan akses internet dan menyediakan paket data khusus UMKM dengan tarif terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- S. Zahra, "Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM," 2022.
- C. Yolanda, "Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia," Manaj. Dan Bisnis, vol. 2, no. 3, 2024.
- R. Sulistyowati et al., "Pelatihan digital marketing dan digitalisasi akuntansi bagi UMKM," Pengabd. Masy. Berkemajuan, vol. 8, no. 3, pp. 2024.
- M. Yusuf, , "Kegiatan sosialisasi digital marketing pelaku UMKM untuk memberdayakan ekonomi masyarakat," Surya Abdimas, vol. 7, no. 1, 2023.
- A. Redi, "Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan," J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni, vol. 6, no. 1, pp. 282–292, 2022.